



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

MANAJEMEN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI TERPADU

**SEMINAR DAN LOKAKARYA PELAKSANAAN TRANSPARANSI DAN UPAYA PERBAIKAN
TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA**

Bandung, 13 November 2014



DAFTAR ISI

- I. LATAR BELAKANG**
- II. MONITORING REALISASI LIFTING MIGAS**
- III. SISTEM MONITORING LIFTING SAAT INI**
- IV. SISTEM MONITORING LIFTING MIGAS TERPADU**
- V. PENUTUP**

I. LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

PP NO. 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN

Pasal 27

- 1) Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Dalam hal SDA berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Mendagri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan Menteri Teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Teknis.
- 3) Ketetapan Mendagri menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri Teknis.
- 4) Ketetapan Menteri Teknis disampaikan ke Menteri Keuangan.
- 5) Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri Teknis.

LATAR BELAKANG

PP NO. 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN

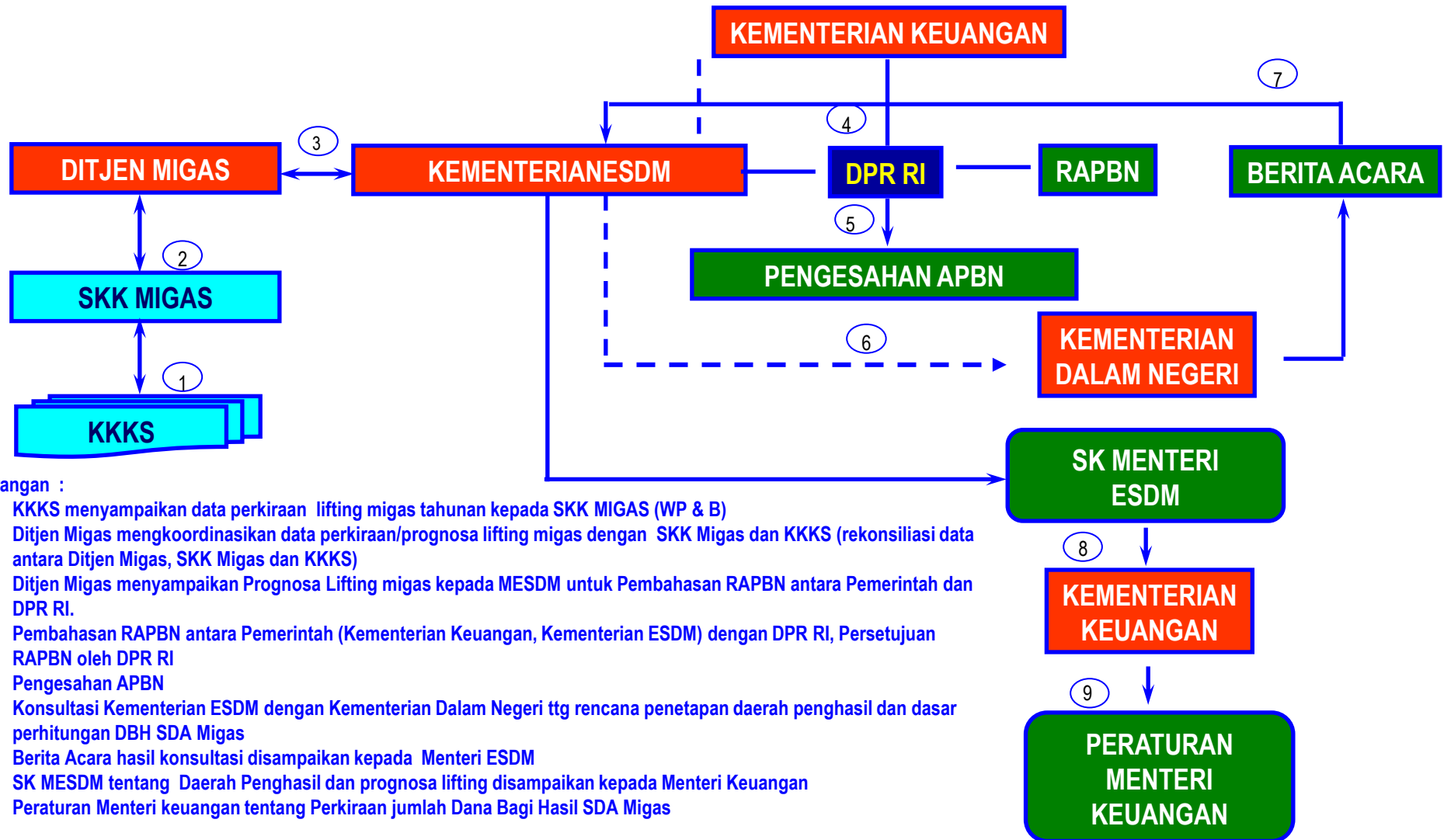
Pasal 28

- 1) Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan.
- 2) Dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.

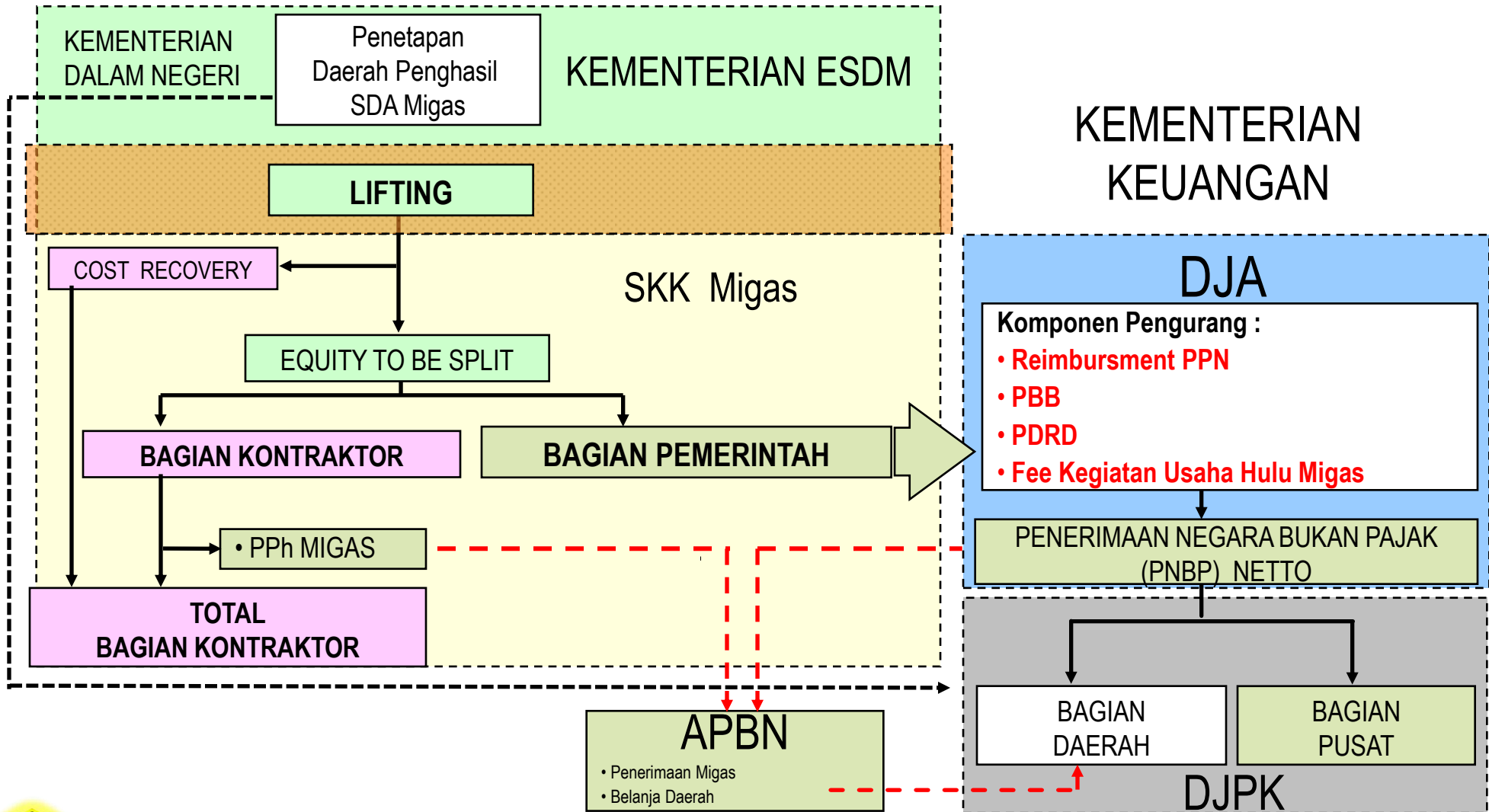
PERAN/FUNGSI INSTANSI DALAM PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA DAN BAGI HASIL MIGAS

NO	INSTANSI	PERAN
1	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> – Penetapan rencana lifting untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas dan daerah administrasi Pemerintahan. – Melakukan rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi lifting dengan daerah secara periodik.
2	SKK MIGAS	<ul style="list-style-type: none"> – Menghitung dan memberikan masukan rencana <i>lifting</i> untuk tahun mendatang berdasarkan daerah penghasil migas. – Menghitung Bagian Pemerintah, Bagian Kontraktor dan Kewajiban Kontraktual dan Kontrak Migas – Memberikan masukan terhadap proses rekonsiliasi/perhitungan bersama realisasi lifting dengan daerah secara periodik.
3	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perhitungan dan pengadministrasian penerimaan minyak dan gas bumi – Melakukan penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
4	Kementerian Dalam Negeri	Memberikan masukan melalui DPOD mengenai daerah administrasi Pemerintahan penghasil migas.

PROSES PENYUSUNAN SK MENTERI ESDM TENTANG DAERAH PENGHASIL DAN PROGNOSA LIFTING MIGAS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA BAGI HASIL SDA MIGAS



MEKANISME PENETAPAN DARAH PENGHASIL DAN PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA MIGAS



KRITERIA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL MIGAS

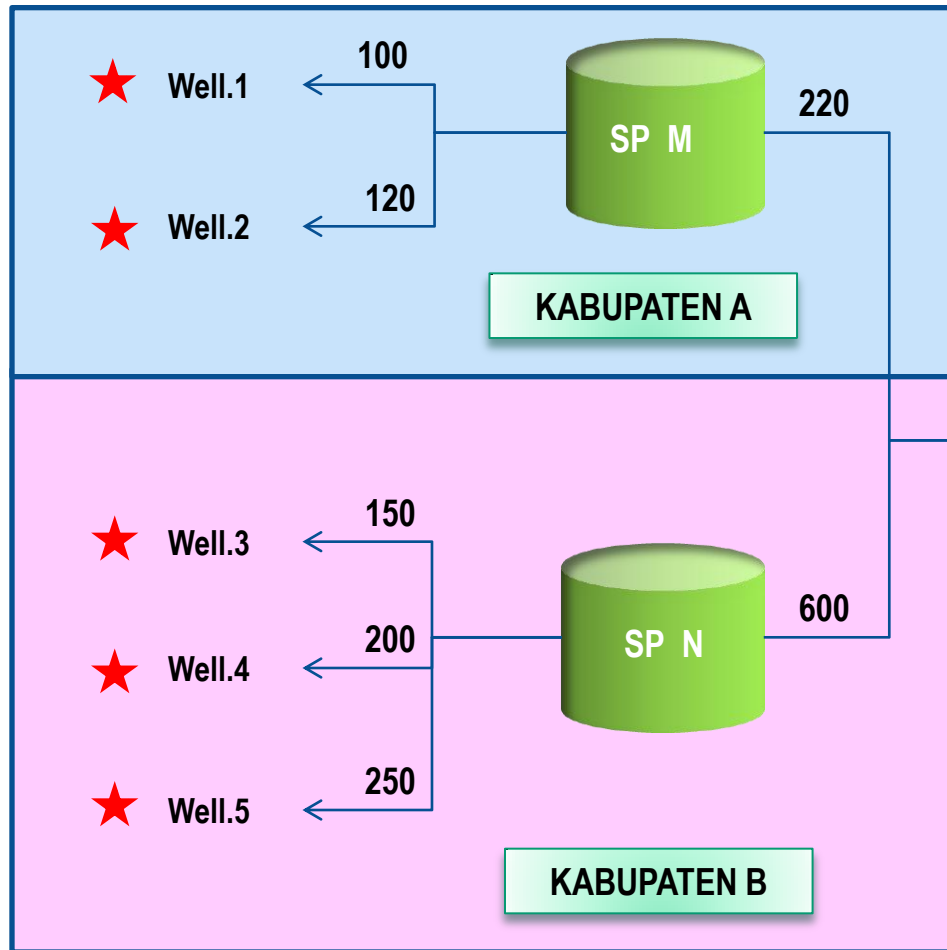
Kriteria Penetapan Daerah Penghasil Minyak Dan Gas Bumi :

- 1) **Daerah Penghasil** Untuk Wilayah Kerja Pertambangan **di Daratan (Onshore)** Adalah **Kabupaten/Kota** Yang Ditetapan Terdapat Lokasi **Kepala Sumur Produksi (Wellhead)** Yang **Menghasilkan** Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi Yang Terjual (**Lifting**) dan Menghasilkan **Penerimaan Negara**.
- 2) **Daerah Penghasil** Untuk Wilayah Kerja Pertambangan **di Lepas Pantai (Offshore)** adalah **Provinsi atau Kabupaten/Kota** Yang Ditetapan Terdapat Lokasi **Kepala Sumur Produksi (Wellhead)** Dan Atau Anjungan (**Platform**) Yang **Menghasilkan Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi** Yang Terjual (**Lifting**) Dan Menghasilkan **Penerimaan Negara** Sesuai Batas Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Yang Bersangkutan.

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota (UU No 32 Tahun Pasal 18 ayat (4))

- 0 – 4 Mil Laut : Kabupaten/Kota;
- 4 – 12 Mil Laut : Provinsi ;
- > 12 Mil Laut : Pemerintah Pusat

ALOKASI LIFTING MIGAS PER DAERAH PENGHASIL

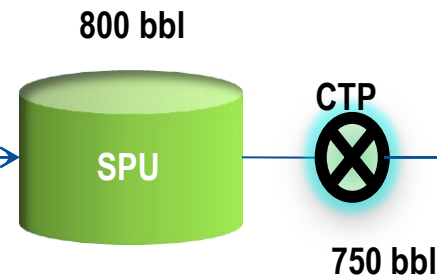


Volume Lifting = 750

$$SP - N = (600/820) \times 750$$

$$SP - M = (220/820) \times 750$$

$$WELL 1 = (100/220) \times SP M$$



Keterangan :

SPU = Stasiun Pengumpul Utama

SP N = Stasiun Pengumpul (N)

SP M = Stasiun Pengumpul (M)

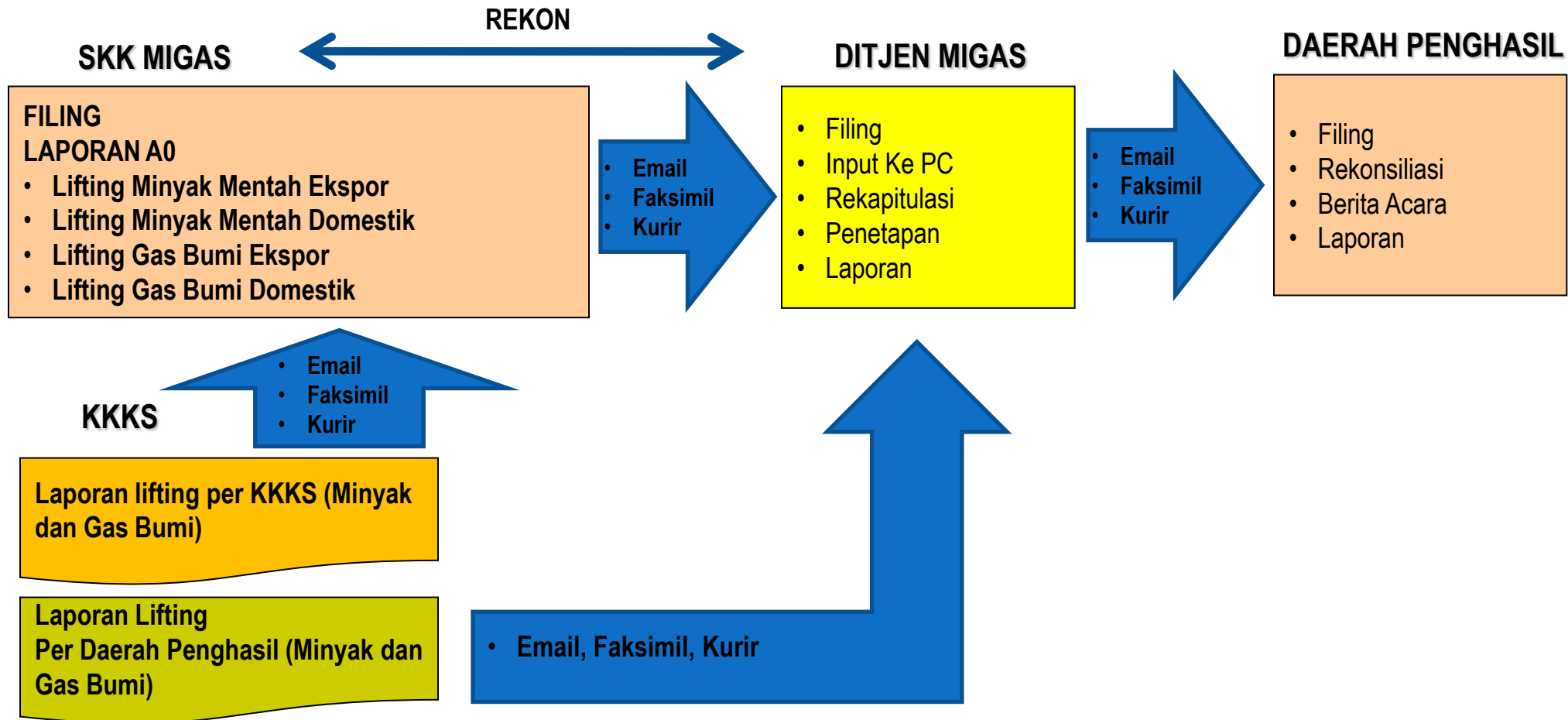


II.

MONITORING REALISASI LIFTING MIGAS

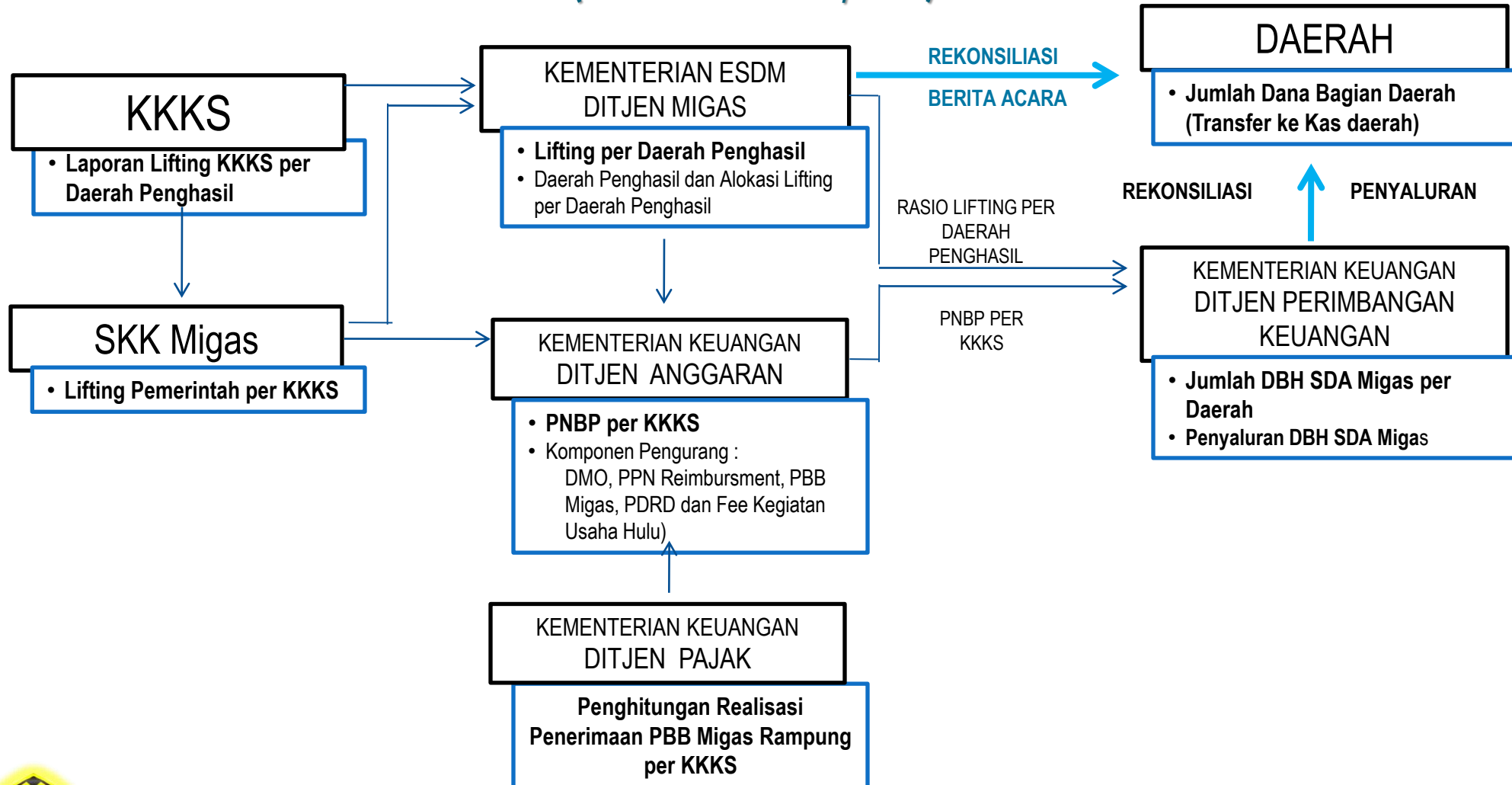
PELAPORAN LIFTING

DALAM PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL MIGAS



REKONSILIASI REALISASI LIFTING MIGAS (TRIWULANAN) DENGAN DAERAH PENGHASIL

(Pasal 27 PP No 55/2005)



BERITA ACARA
PENGHITUNGAN REALISASI LIFTING MIGAS KUMULATIF S.D. TRIWULAN IV 2013
PROVINSI JAMBI
Nomor : 16/lifting-TW IV/DMBP/2013

Pada hari ini Kamis, 23 Januari 2014, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Anggaran Kemkeu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu, Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemdagri, SKK Migas (termasuk Kontraktor KKS yang bersangkutan dan PT Pertamina EP), bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Penghasil Migas seluruh Provinsi Jambi, telah melaksanakan penghitungan realisasi lifting minyak bumi dan gas alam kumulatif s.d. Triwulan IV tahun 2013 (periode Desember 2012 s.d. November 2013) dengan hasil sebagai berikut :

A. MINYAK BUMI

No.	Daerah Kabupaten/Kota Penghasil	LIFTING			GROSS REVENUE	
		Prognosa 2013 (Ribu US \$)	Realisasi s.d. TW IV THN 2013 (Ribu US \$)	%	Realisasi s.d. TW IV THN 2013 (Ribu US \$)	LIFTING PEMERINTAH (Ribu US \$)
1	Kab. Batang Hari	125,83	144,59	114,91	15,680,17	6,021,97
2	Kab. Muaro Jambi	96,99	957,50	99,07	104,078,06	39,971,19
3	Kab. Talo	3,23	230,81	68,10	25,075,50	3,086,20
4	Kota Jambi	495,00	495,00	95,64	53,725,46	20,633,27
5	Kab. Tj. Jabung	82,23	1,653,57	90,79	169,899,25	107,104,83
6	Kab. Tj. Jabung Timur	416,04	3,984,62	95,72	408,274,56	257,588,95
7	Kab. S. Bulungan	1,404,79	1,285,90	91,54	139,439,24	53,225,14
JUMLAH		9,191,08	8,751,99	95,22	916,152,24	487,631,56

B. GAS ALAM

No.	Daerah Kabupaten/Kota Penghasil	LIFTING			GROSS REVENUE	
		Prognosa 2013 (Ribu MMBTU)	Realisasi s.d. TW IV THN 2013 (Ribu MMBTU)	%	Realisasi s.d. TW IV THN 2013 (Ribu US \$)	LIFTING PEMERINTAH (Ribu US \$)
1	Kab. Batang Hari	-	-	-	40,52	12,31
2	Kab. Tj. Jabung Timur	23,295,92	26,370,10	113,30	410,708,60	107,329,69
3	Kab. Tj. Jabung Barat	43,258,64	53,554,81	123,80	841,791,76	200,532,03
4	Muaro Jambi	1,003,60	1,946,10	194,11	10,170,60	1,535,85
JUMLAH		67,558,17	81,873,01	121,19	1,262,711,48	329,409,84

Dari hasil penghitungan realisasi lifting migas kumulatif s.d. Triwulan IV tahun 2013 diatas, masing-masing pihak dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- Hasil penghitungan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk seluruhnya dipergunakan sebagai dasar penghitungan dan penyaluran bagi hasil SDA migas s.d. Triwulan IV tahun 2013;
- Data realisasi lifting migas disusun berdasarkan laporan Kontraktor KKS/SKK Migas dan PT Pertamina EP, kepada Ditjen Migas sebagaimana copinya telah disampaikan

kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Penghasil yang bersangkutan sebelum pelaksanaan penghitungan ini;

3. Dalam menghitung Gross Revenue didasarkan atas Harga Minyak Mentah Indonesia/Indonesian Crude Price (ICP) dan Harga Gas pada periode bulan yang bersangkutan;
4. Rincian perhitungan realisasi lifting migas s.d. Triwulan IV tahun 2013 per Kabupaten/Kota Penghasil Migas disampaikan dalam Lampiran Berita Acara ini, apabila terjadi perubahan terhadap data-data lifting diatas, akan dikoordinasikan dengan pihak terkait;
5. Lampiran Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara penghitungan realisasi lifting migas s.d. Triwulan IV tahun 2013.

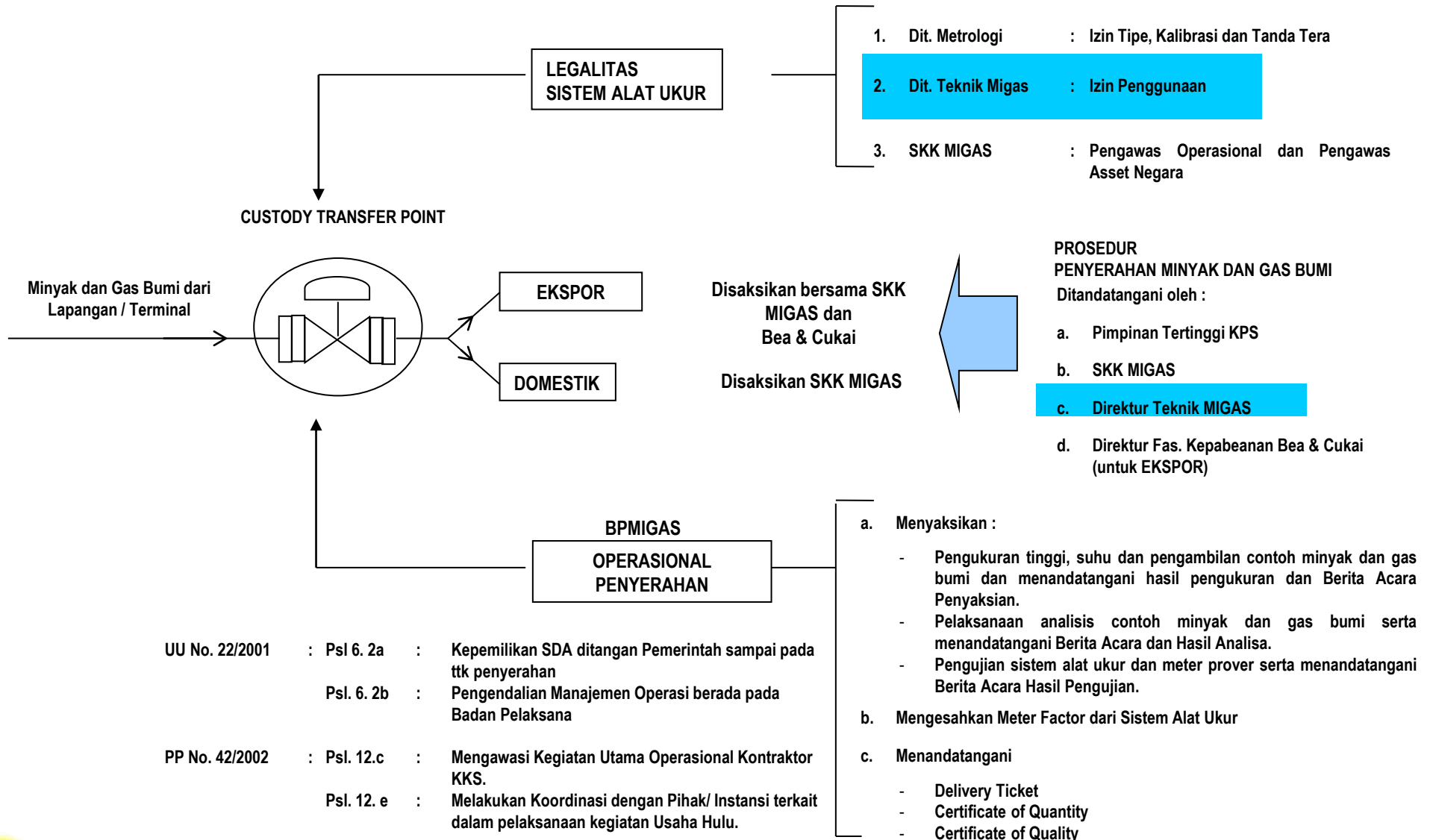
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penghitungan dan penyaluran bagi hasil SDA migas tahun 2013, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau (diperbaiki kembali) sesuai dengan data terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan.

No.	Instansi	Koordinator	Tanda Tangan
1	Ditjen Migas	Ir. I Gusti Suarnaya Sidemen, LLM	1
2	Ditjen Anggaran (Kemkeu)		2
3	Ditjen Pajak (Kemkeu)		3
4	Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemkeu)		4
5	Ditjen Keuangan Daerah (Kemdagri)		5
6	SKK Migas	M. Nurdin Zulkarnaen	6
7	Provinsi Jambi	7.a) Budidaya 7.b) H. Nur Muhtamad	7.a) Budidaya 7.b) H. Nur Muhtamad
8	Kabupaten Batanghari	8.a) Dr. M. HASTA, Au 8.b) AMIN Hamsah	8.a) Dr. M. HASTA, Au 8.b) AMIN Hamsah

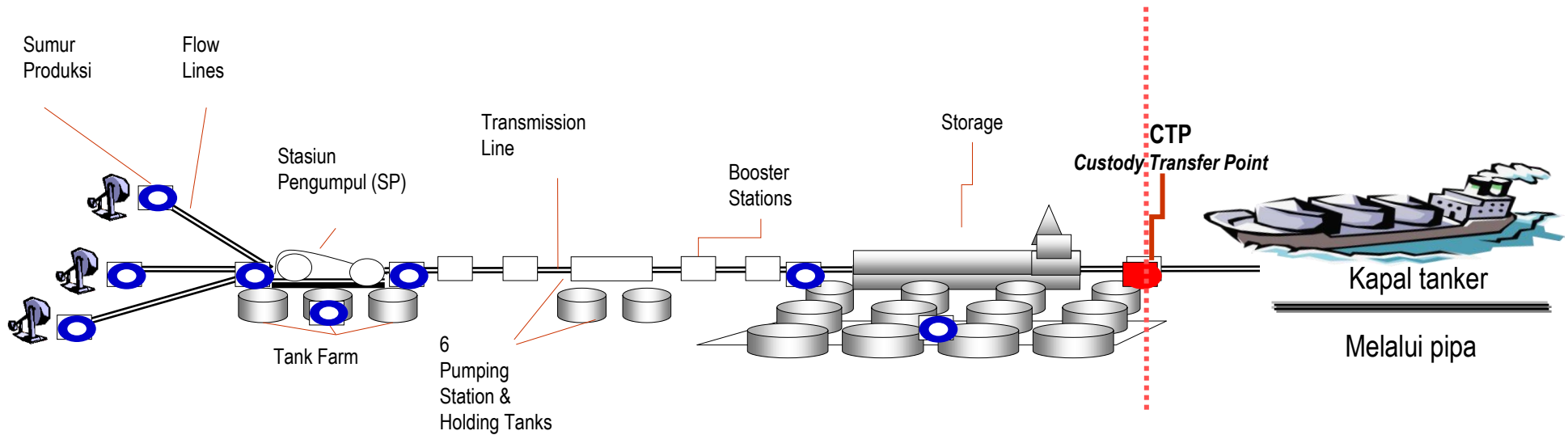
No.	Instansi	Koordinator	Tanda Tangan
9	Kabupaten Muaro Jambi	9.a) SUDIRMAN 9.b) M. AZZULHAN	9.a) SUDIRMAN 9.b) M. AZZULHAN
10	Kota Jambi	10.a) Nurul Muchlisah 10.b) Zainab	10.a) Nurul Muchlisah 10.b) Zainab
11	Kabupaten Tj. Jabung Timur	11.a) SULARTO 11.b) ALFADRI	11.a) SULARTO 11.b) ALFADRI
12	Kabupaten Tj. Jabung Barat	12.a) 12.b)	12.a) 12.b)
13	Kabupaten Sarolangun	13.a) ABDUL HAKIS 13.b) Sugeng Mulyadi E.	13.a) ABDUL HAKIS 13.b) Sugeng Mulyadi E.
14	Kabupaten Tebo	14.a) WAZAL EPRINI 14.b) Agus Sunaryo	14.a) WAZAL EPRINI 14.b) Agus Sunaryo

CONTOH BERITA ACARA REKONSILIASI LIFTING MIGAS DENGAN DAERAH PENGHASIL

OPERASIONAL PENGUKURAN & PENYERAHAN MIGAS



PELAPORAN LIFTING



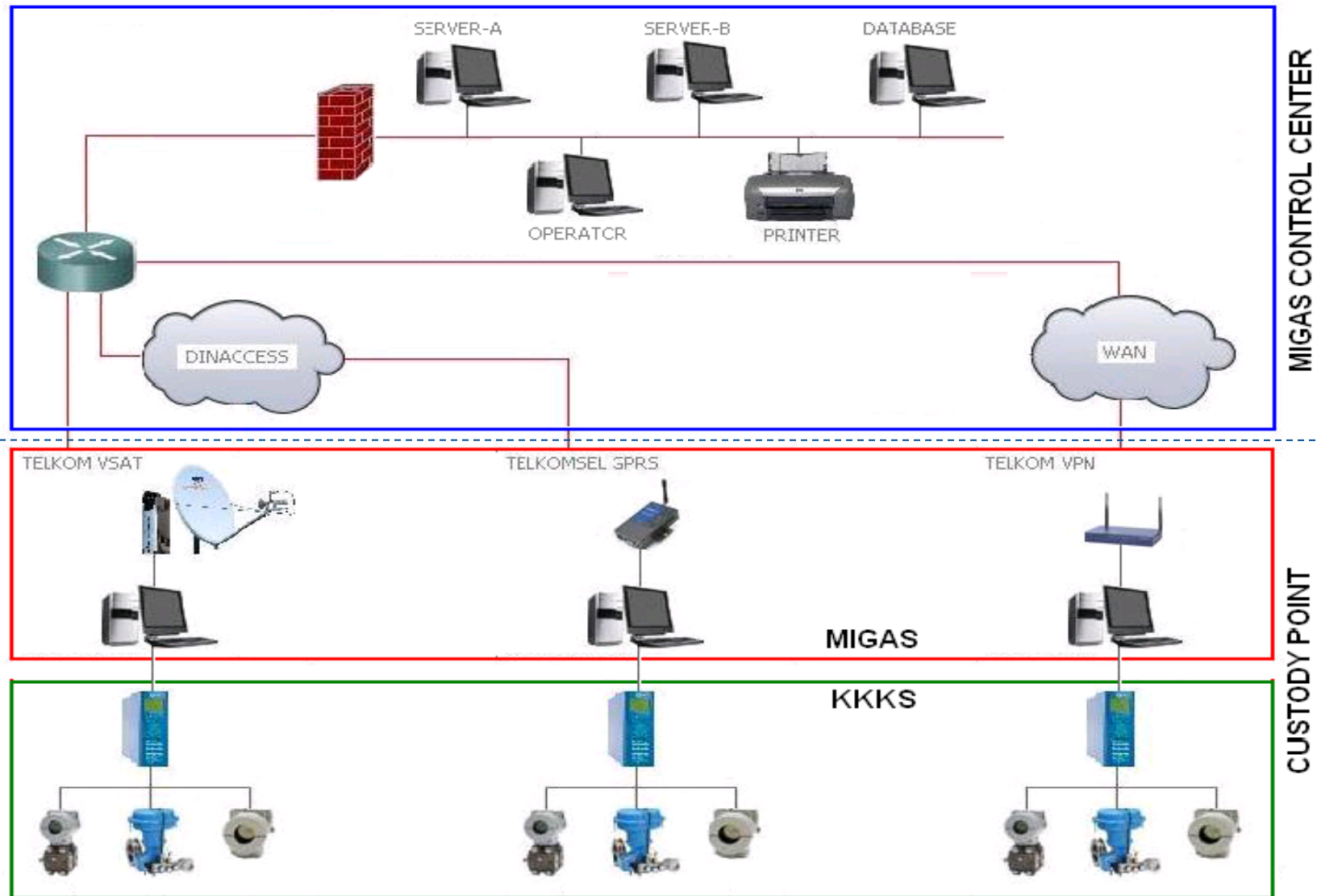
LIFTING:

- KKKS & SKK MIGAS menyaksikan setiap proses pengapalan dan menetapkan volume yang dikapalkan dicatat dalam dokumen Bill of Lading (B/L)
- Ditjen Migas (KESDM) melakukan monitoring online real time pada 48 CTP migas
- KKKS melakukan penagihan kepada SKK Migas
- KKKS melaporkan lifiting per Daerah Penghasil (bulanan) kepada Ditjen Migas
- Saat ini terdapat 111 CTP minyak dan gas bumi

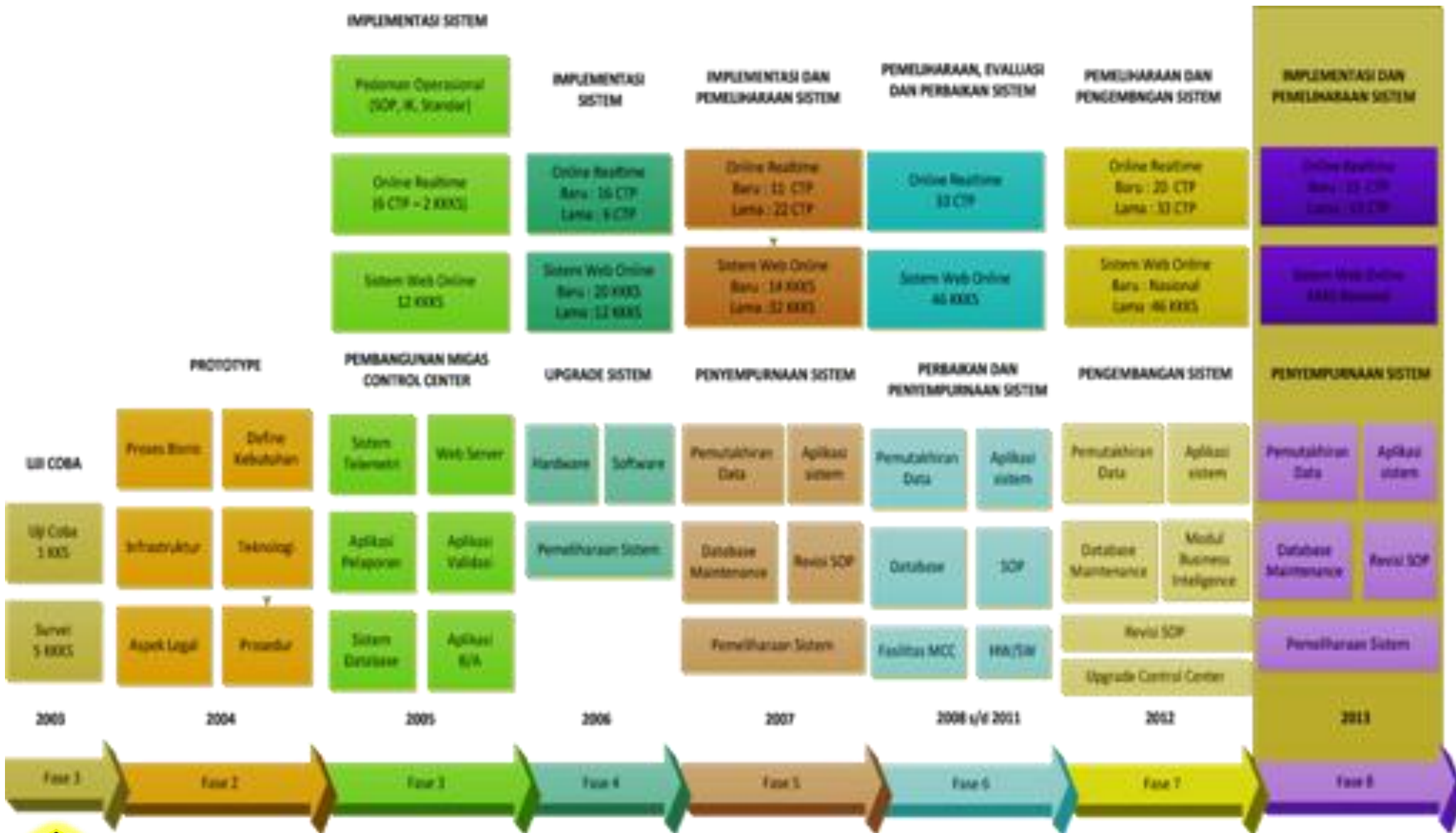
III.

SISTEM MONITORING LIFTING SAAT INI

TOPOLOGY SYSTEM



FASE IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM





MONITORING VOLUME LIFTING MINYAK BUMI NASIONAL BULAN FEBRUARI 2013

Pilih Produk : Minyak Pilih Tahun : 2013 Pilih Bulan : Februari Tampilkan

VOLUME LIFTING MINYAK BUMI

No.	KKKS	Volume/Hari (MBOPD)	Volume (MBBL)
1	Chevron Pasific Indonesia - Rokan	324.74	9,092.71
2	Pertamina Hulu Energy ONWJ	44.10	1,234.73
3	Inpex Corporation	42.76	1,197.22
4	Total E&P Indonesia	39.07	1,093.87
5	ConocoPhillips Intl. Inc. Ltd. Natuna Sea Area Blok B	31.37	878.45
6	CNOOC (South East Sumatera B.V) SES	28.67	802.69
7	TAC - Unitisasi Sukowati	25.53	714.84
8	Exxon Mobil Cepu	24.77	693.67
9	Chevron Indonesia Company	23.60	660.83
10	PT. Pertamina EP Area Jawa Bagian Barat	16.96	474.76
	KKKS LAINNYA	220.00	6,159.98
	TOTAL LIFTING NASIONAL	821.56	23,003.73

[LIHAT SEMUA](#)

Catatan:

- Data Sementara - NOMINASI (**)
- Data Sementara - DATA KKKS (*)

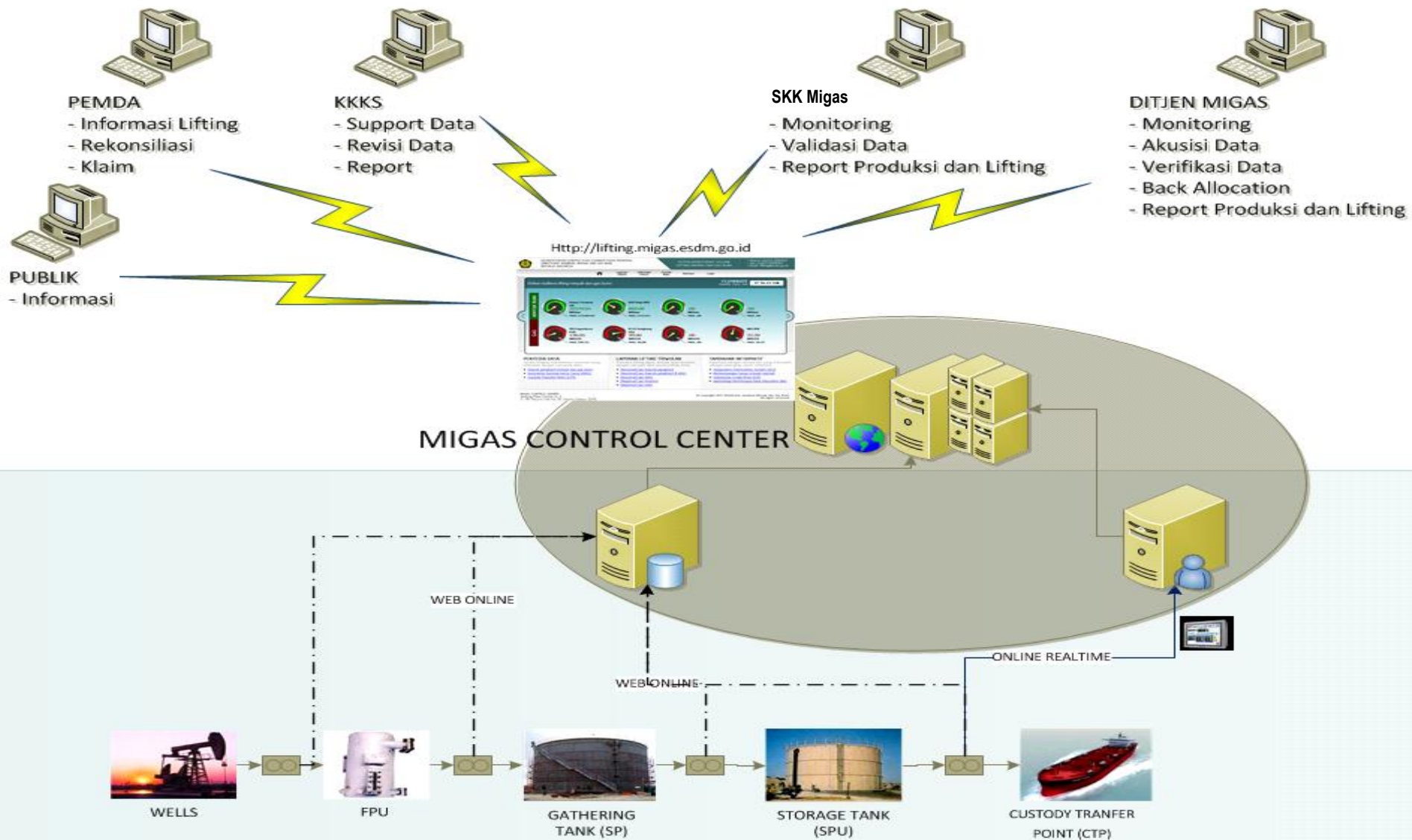
IV.

SISTEM MONITORING LIFTING MIGAS TERPADU

SISTEM MONITORING LIFTING MIGAS TERPADU

1. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Kegiatan Lifting Migas
2. Meningkatkan akses data lifting migas bagi stakeholder
3. Meminimalisasi perbedaan data lifting migas antar stakeholder
4. Memerlukan harmonisasi antar sistem informasi yang telah dikembangkan

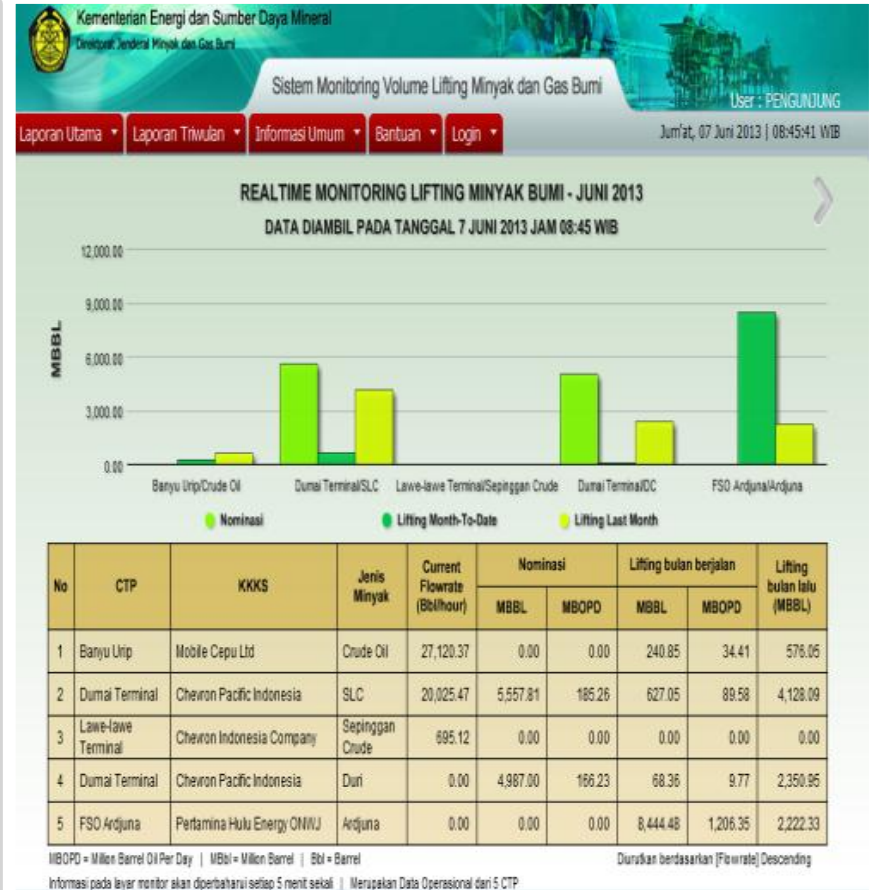
KONSEP DASAR SISTEM



SISTEM MONITORING LIFTING MIGAS



Sistem Monitoring Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi Real Time (Telemetry Base)



Sistem Informasi Volume Produksi dan Lifting Minyak dan Gas Bumi (Web Base)

SISTEM MONITORING VOLUME LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI REAL TIME (TELEMETRI BASE)

Tujuan Sistem :

1. Akuisisi Data secara online realtime dengan menggunakan teknologi telemetri untuk mengumpulkan data-data perhitungan volume lifting sebagai dasar dari pengawasan (Monitoring) terhadap laporan lifting yang disampaikan setiap bulannya oleh pihak KKKS.
2. Kegiatan ini adalah melakukan pemasangan alat pantau di setiap CTP dan alat tersebut akan mengambil data volume lifting secara online & realtime.

Input Sistem :

1. Survey Lokasi untuk pemasangan CTP
2. Informasi Komunikasi jaringan yang berada dilokasi
3. Data Parameter Tagname/Register Address dari CTP yang akan dilakukan pemasangan alat pantau, baik minyak dan gas bumi

Output Sistem :

Data Volume Lifting di CTP, dapat dimonitor secara online realtime ke Migas Control Center

SISTEM INFORMASI VOLUME PRODUKSI DAN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI (WEB BASE)

Tujuan Sistem :

1. Mendapatkan data atau informasi volume lifting minyak dan gas bumi secara akurat dari KKKS.
2. Data tersebut diolah serta pembagiannya sesuai dengan masing-masing daerah penghasil melalui aplikasi Back Allocation yang berada dalam sistem.
3. Menjadi data pembandingan (Self Assesment) dari data yang disampaikan oleh KKKS.

Input Sistem :

1. Data Sumur.
2. Data volume lifting.
3. Diagram Alir minyak atau gas bumi dari sumur.
4. Durasi produksi sumur minyak atau gas bumi harian.
5. Uji produksi setiap sumur.
6. Data Profile KKKS.

Output Sistem :

1. Tampilan Profile KKKS di Website.
2. Laporan bagi hasil daerah penghasil dengan aplikasi Back Allocation.
3. Laporan realisasi lifting bulanan.



PENUTUP

PENUTUP

1. Sistem monitoring lifting migas terpadu pada prinsipnya dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi
2. Sistem monitoring lifting migas terpadu akan memudahkan koordinasi
3. Diperlukan dukungan dan komitmen stakeholder untuk berkolaborasi



Terima Kasih

www.esdm.go.id